

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketahanan pangan dapat dipahami sebagai kondisi ketika kebutuhan pangan suatu negara hingga tingkat individu terpenuhi secara menyeluruh. Hal ini mencakup ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, aman dikonsumsi, beragam, bergizi seimbang, tersebar secara merata, serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pemenuhan pangan juga harus selaras dengan nilai agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga mampu mendukung kehidupan yang sehat, aktif, produktif, dan berkelanjutan (Wehantouw et al., 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana ketersediaan pangan terpenuhi untuk semua lapisan masyarakat, mulai dari tingkat negara hingga individu (Lembaran Negara Republik Indonesia, n.d.). Kondisi ini ditandai dengan makanan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai, aman untuk dikonsumsi, beragam jenisnya, bergizi seimbang, tersebar merata, dan mudah diakses. Selain itu, penyediaan pangan harus sesuai dengan nilai-nilai budaya, agama, dan keyakinan setempat sehingga masyarakat dapat terus hidup sehat, aktif, dan produktif.

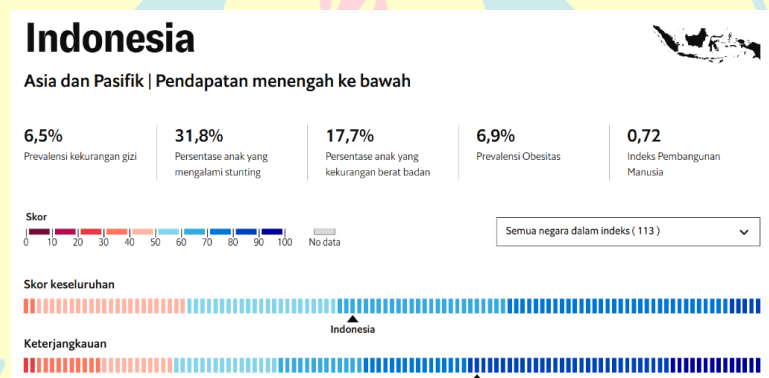
Ketahanan pangan mencakup lebih dari sekedar ketersediaan makanan; itu juga mencakup seberapa mudah sistem pangan di seluruh negeri dapat diakses dan bertahan lama. Dalam upaya mewujudkan

keberhasilan pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia berpartisipasi aktif dalam mendukung dan melaksanakan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yang merupakan komitmen untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dalam upaya mewujudkan kemajuan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat (Nasional et al., n.d.).

Mengingat bagaimana pangan memengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat suatu negara, pangan adalah pilar utama dari 17 *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan 169 targetnya. Tujuan kedua, "Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*)," secara eksplisit menjelaskan masalah ini. Tujuan kedua menekankan pentingnya meningkatkan ketahanan pangan dan status gizi secara bersamaan serta mengakhiri kelaparan secara total. Tujuan kedua juga menekankan pentingnya membangun sistem pertanian yang berkelanjutan, yang merupakan syarat penting untuk memastikan ketersediaan pangan yang memadai dan bergizi seimbang di seluruh dunia (Food and Agriculture Organization et al., 2020).

Ketahanan pangan telah berkembang menjadi salah satu masalah paling penting dalam pembangunan nasional dan internasional. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan; itu juga mencakup faktor-faktor seperti akses, pemanfaatan, dan stabilitas pasokan, yang semua berkontribusi pada kualitas hidup manusia. Kondisi ketahanan pangan di banyak negara, termasuk Indonesia, telah diburukkan oleh

sejumlah variabel di seluruh dunia, termasuk perubahan iklim, peningkatan jumlah penduduk, fluktuasi ekonomi, dan pandemi COVID-19. Menurut Laporan *Global Food Security Index* (GFSI), Indonesia masih menghadapi masalah besar, dengan tingkat kekurangan gizi sebesar 6,5 persen dan angka stunting anak 31,8 persen pada tahun 2022 (Economist Impact, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa masalah ketahanan pangan di Indonesia mencakup berbagai aspek, termasuk faktor ekonomi, sosial, distribusi, dan produksi, yang saling berkorelasi satu sama lain.

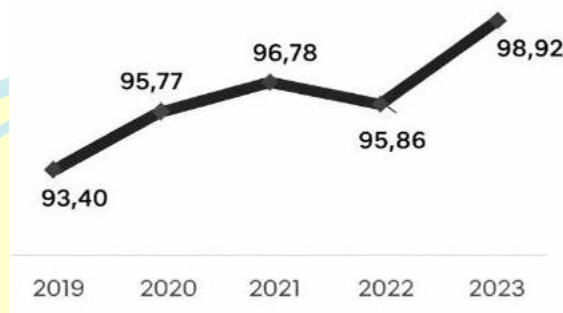


Gambar 1. 1 Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2022

Sumber: *Economics Impact*

Ketersediaan Pola Pangan Harapan (PPH) adalah salah satu indikator yang mencerminkan kualitas dan keragaman penyediaan pangan. Ini menunjukkan seberapa jauh struktur penyediaan pangan telah bergerak menuju komposisi pangan yang beragam dan seimbang. Antara tahun 2019 dan 2023, skor PPH ketersediaan Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat meskipun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, skornya sebesar 93,40, kemudian meningkat menjadi 95,77 pada tahun 2020 dan kembali naik menjadi 96,78 pada tahun 2021. Namun, pada tahun

2022, skor turun menjadi 95,86 sebelum kembali meningkat menjadi 98,92 pada tahun 2023. Namun demikian, skor PPH ketersediaan merefleksikan struktur penyediaan pangan pada level makro, bukan konsumsi aktual atau akses rumah tangga terhadap pangan tersebut.



Gambar 1. 2 skor PPH Indonesia Tahun 2019-2023

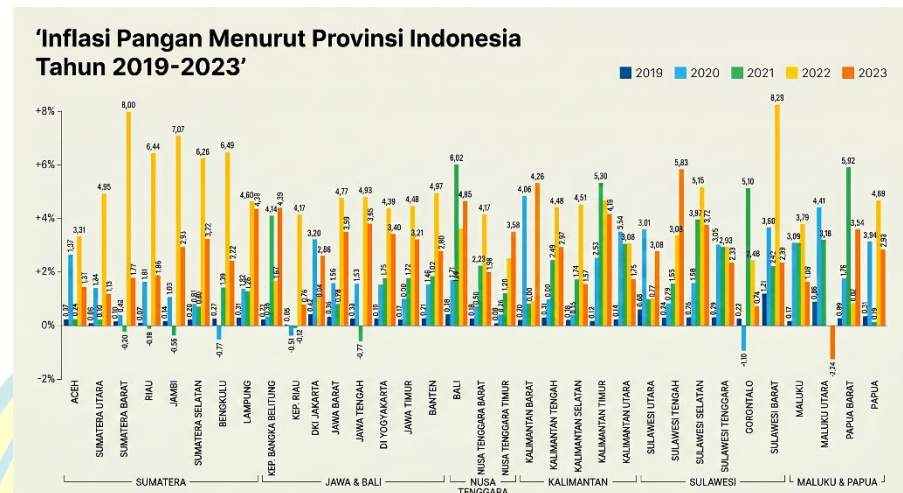
Sumber: Badan Pusat Statistik

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) digunakan untuk mengukur kualitas dan keragaman penyediaan pangan secara nasional. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menggambarkan kualitas dan keragaman ketersediaan pangan secara nasional. Peningkatan skor PPH selama periode 2019–2023 menunjukkan bahwa struktur penyediaan pangan Indonesia cenderung semakin beragam dan mendekati pola pangan ideal. Meskipun demikian, peningkatan ketersediaan pangan belum tentu diikuti oleh peningkatan akses pangan yang merata bagi seluruh masyarakat. Tidak hanya ketersediaan pangan, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk mendapatkan jumlah makanan yang cukup dan bergizi adalah faktor yang menentukan ketahanan pangan. (Headey & Ruel, 2023).

Salah satu indikator yang menunjukkan perubahan harga komoditas pangan yang dikonsumsi masyarakat adalah inflasi pangan. Kenaikan harga pangan berpotensi membuat orang lebih sulit mendapatkan makanan yang mereka butuhkan, terutama bagi rumah tangga yang sebagian besar pendapatannya dihabiskan untuk membeli makanan. Kenaikan harga pangan juga berpotensi mendorong pergeseran pola konsumsi masyarakat ke arah makanan yang lebih murah dan kurang gizi. Penelitian (Bogmans et al., 2024) menunjukkan bahwa peningkatan inflasi pangan dikaitkan dengan peningkatan risiko berbagai masalah gizi dan penurunan keragaman konsumsi pangan.

Inflasi pangan Indonesia sangat berubah antarprovinsi dari 2019 hingga 2023. Beberapa provinsi mencatat inflasi pangan yang relatif tinggi pada tahun 2022, seperti Sumatera Barat sebesar 8,00 persen, Jambi sebesar 7,07 persen, Bengkulu sebesar 6,49 persen, dan Riau sebesar 6,44 persen. Meskipun inflasi pangan cenderung melambat pada tahun 2023, perbedaan tingkat inflasi antarprovinsi tetap ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan di Indonesia belum merata. Perubahan harga pangan yang berbeda di berbagai wilayah dapat memengaruhi kemampuan masyarakat untuk mendapatkan makanan, yang dapat berdampak pada tingkat ketahanan pangan. Oleh karena itu, dalam analisis ketahanan pangan

Indonesia, inflasi pangan harus menjadi salah satu komponen yang perlu diperhatikan.

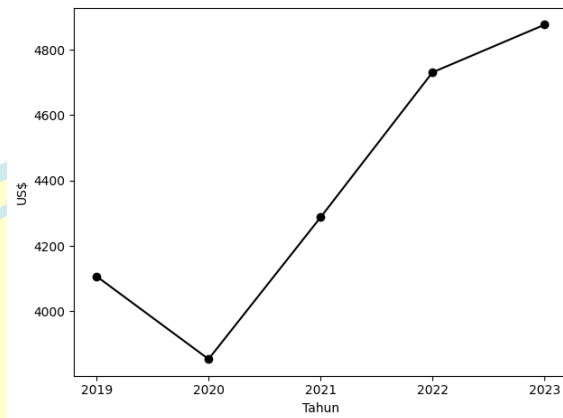


Gambar 1. 3 Inflasi Pangan Menurut Provinsi Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik

Stabilitas harga dan kemampuan ekonomi masyarakat memengaruhi akses pangan. Pendapatan per kapita adalah salah satu indikator yang menunjukkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mempertahankan kondisi ketahanan pangan. Dari sisi kesejahteraan ekonomi, pendapatan per kapita Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, pendapatan per kapita tercatat sebesar USD 4.106,9, tetapi sebagai akibat dari pandemi COVID-19, yang menekan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat, pendapatan per kapita turun drastis menjadi USD 3.853,7 pada tahun 2020. Seiring dengan pemulihan ekonomi, pendapatan per kapita kembali meningkat menjadi USD 4.287,2 pada tahun 2021, lalu terus naik menjadi USD 4.730,8 pada tahun 2022 dan USD 4.876,3 pada tahun 2023. Meskipun tren ini menunjukkan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan, peningkatan pendapatan per kapita belum

sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Akibatnya, dampak peningkatan akses dan keterjangkauan pangan masih menghadapi banyak tantangan, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.



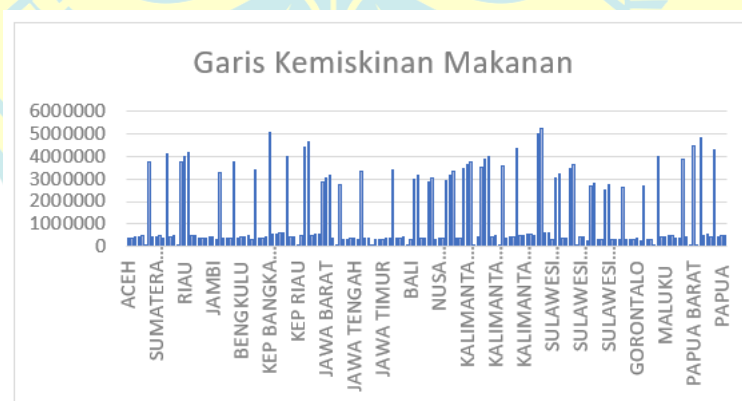
Gambar 1. 4 GDP per capita Indonesia (current US\$)

Sumber: World bank

Faktor utama yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga adalah pendapatan per kapita, bersama dengan faktor produksi. Dengan peningkatan pendapatan, orang lebih cenderung membeli makanan sehat dan beragam. Namun, ketimpangan pendapatan di Indonesia masih tinggi, yang menyebabkan ketidaksamaan dalam akses ke makanan berkualitas. Kondisi ketahanan pangan diperburuk oleh ketimpangan distribusi pendapatan, terutama di wilayah pedesaan. Akibatnya, tanpa diikuti dengan pemerataan ekonomi dan penguatan sistem distribusi pangan, peningkatan pendapatan per kapita tidak serta merta meningkatkan ketahanan pangan (Rozaki Zuhud et al., 2023).

Selama periode 2019–2023, Garis Kemiskinan Makanan (GKM) di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat, dan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia cukup berubah sesuai dengan peran

pendapatan per kapita dalam menentukan ketahanan pangan rumah tangga. Berdasarkan data grafik dibawah ini, selama periode tersebut, Kepulauan Bangka Belitung memiliki GKM tertinggi. Biaya pemenuhan kebutuhan pangan minimum naik dari Rp492.693,00 pada tahun 2019 menjadi Rp524.371,00 pada tahun 2020, Rp544.017,00 pada tahun 2021, dan Rp579.537,00 pada tahun 2022, dengan puncaknya pada tahun 2023 adalah Rp636.311,00. Sementara itu, standar GKM terendah di Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 adalah Rp245.761,00. Namun, dari tahun 2020 hingga 2023, Sulawesi Selatan menempati posisi terendah ini dengan nilai yang terus meningkat dari Rp263.690,00 pada tahun 2020, Rp279.240,00 pada 2021, Rp299.433,00 pada 2022, dan Rp325.418,00 pada 2023. Tren kenaikan tanpa penurunan ini menunjukkan tekanan inflasi pada harga komoditas pangan pokok yang terus meningkat setiap tahun. Akibatnya, beban rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dasar mereka terus meningkat.



Gambar 1. 5 GKM menurut Provinsi Indonesia Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kemiskinan adalah komponen penting lainnya yang berdampak langsung pada ketahanan pangan. Sulit bagi rumah tangga yang miskin untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka dalam jumlah dan kualitas, karena mereka cenderung memiliki keterbatasan daya beli. Konsumsi pangan berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dengan nilai gizi yang rendah, yang meningkatkan kerentanan terhadap kekurangan gizi. Selain itu, kemiskinan juga membatasi akses terhadap layanan pendukung seperti kesehatan, pendidikan, dan informasi gizi, yang secara tidak langsung memperburuk kondisi ketahanan pangan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kemiskinan yang tinggi berkorelasi dengan risiko kerawanan pangan, terutama pada masyarakat dengan sumber pendapatan yang tidak tetap (Evalia et al., 2025).

Untuk meningkatkan ketahanan pangan, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program, termasuk Program Ketersediaan Pangan Nasional, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, pelaksanaan program-program tersebut sering kali menghadapi masalah dalam hal efisiensi penyaluran dan sasaran yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi, sosial, dan distribusi masih perlu diintegrasikan dengan lebih baik ketika datang ke pembuatan kebijakan ketahanan pangan yang berkelanjutan (Herdiansyah et al., 2024).

Studi empiris sebelumnya telah memberikan fondasi teoretis dan metodologis untuk menyelidiki kompleksitas hubungan antara ketahanan pangan, produksi, dan ekonomi. Misalnya, Marwa et al. (2025) mengatakan

bahwa ketersediaan bukan satu-satunya masalah ketahanan pangan di Indonesia; masalah diversifikasi pangan dan ketimpangan sosial ekonomi juga terkait. Studi yang dilakukan oleh Bhatti & Jabbar (2024) menemukan temuan penting bahwa meskipun peningkatan pendapatan per kapita dapat mengurangi tingkat kemiskinan, dampaknya terhadap peningkatan ketahanan pangan tidak selalu merata dan langsung, terutama karena ketimpangan regional. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme distribusi yang efektif diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi makro agar manfaatnya dapat dirasakan pada tingkat akses pangan rumah tangga.

Aspek distribusi dan ketersediaan makanan bukan satu-satunya hal yang diperhatikan dalam analisis ketahanan pangan. Harga pangan juga berpengaruh. Studi yang dilakukan Ahmed et al. (2025) menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara inflasi pangan dan tingkat kerawanan pangan. Penurunan kemampuan rumah tangga untuk mendapatkan makanan yang sehat, terutama bagi keluarga berpendapatan rendah, disebabkan oleh peningkatan harga makanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang mengalami kekurangan pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) meningkat sebesar 0,06 poin persentase setiap kenaikan inflasi pangan sebesar 1 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan adalah salah satu syarat penting untuk menjaga akses pangan dan mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Meskipun sejumlah besar penelitian telah menyelidiki komponen yang memengaruhi ketahanan pangan, masih ada beberapa area penelitian

yang perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian sebelumnya biasanya menganalisis pengaruh inflasi pangan, pendapatan per kapita, dan kemiskinan secara terpisah, sehingga tidak memberikan gambaran yang menyeluruh tentang bagaimana interaksi ketiga variabel tersebut memengaruhi ketahanan pangan. Selain itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa, karena berbagai kondisi sosial ekonomi dan karakteristik wilayah, peningkatan pendapatan per kapita tidak selalu diikuti oleh peningkatan ketahanan pangan yang merata. Sebaliknya, variasi kondisi antarprovinsi dan dinamika ekonomi terbaru tidak dapat diamati karena sebagian penelitian masih menggunakan data agregat nasional atau periode sebelum pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penelitian yang mengintegrasikan inflasi pangan, pendapatan per kapita, dan garis kemiskinan makanan terhadap ketahanan pangan diperlukan. Penelitian ini akan menggunakan data panel dari 34 provinsi di Indonesia selama periode 2019–2023.

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana ketiga variabel utama, yaitu inflasi pangan, perpendapatan per kapita, dan tingkat kemiskinan yang saling berinteraksi, memengaruhi ketahanan pangan. Analisis ini akan menggunakan model terintegrasi untuk menguji bagaimana tekanan inflasi harga kelompok makanan, perubahan kesejahteraan ekonomi, dan kerentanan kemiskinan saling berkaitan dalam membentuk kondisi ketahanan pangan. Ini berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung

parsial. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar untuk mendukung kebijakan pangan yang lebih kontekstual, fleksibel, dan efisien dengan menyajikan bukti empiris yang solid dan terbaru. Berdasarkan bukti ini, sangat penting untuk membuat intervensi yang tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga memperluas akses, memperkuat jaring pengaman sosial, dan mengurangi dampak pertumbuhan penduduk terhadap ketersediaan dan daya beli pangan di zaman sekarang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana inflasi pangan akan mempengaruhi ketahanan pangan Indonesia dari 2019 hingga 2023?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan per kapita terhadap ketahanan pangan Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023?
3. Bagaimana tingkat kemiskinan akan mempengaruhi ketahanan pangan Indonesia dari 2019 hingga 2023?
4. Seberapa besar dampak pertumbuhan penduduk, pendapatan per kapita, dan tingkat kemiskinan secara bersamaan terhadap ketahanan pangan Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis inflasi pangan terhadap ketahanan pangan Indonesia tahun 2019–2023.
2. Menganalisis pengaruh pendapatan per kapita terhadap ketahanan pangan Indonesia tahun 2019–2023.

3. Mnganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap ketahanan pangan Indonesia tahun 2019–2023.
4. Menganalisis pengaruh secara simultan antara pertumbuhan penduduk, pendapatan per kapita, dan tingkat kemiskinan terhadap ketahanan pangan Indonesia tahun 2019–2023.



1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam kajian ekonomi pembangunan dan ketahanan pangan. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur empiris mengenai hubungan antara factor ekonomi makro terhadap ketahanan pangan di negara berkembang seperti Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, terutama pemerintah dan lembaga terkait, ketika mereka membuat rencana untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menghentikan kemiskinan.

3. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang ingin meneliti lebih lanjut tentang ketahanan pangan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan model penelitian yang lebih kompleks yang menggunakan berbagai periode, variabel, dan metodologi.